



KR-Surya Adi Lesmana

PESEPEDA DI TUGU: Pesepeda singgah menikmati suasana Tugu Pal Putih Yogyakarta menjelang petang, Senin (1/6). Jumlah pesepeda maupun masyarakat yang nongkrong di kawasan ini kian meningkat, namun diharapkan tetap menjalankan protokol kesehatan demi mencegah penularan Covid-19.

GOTONG ROYONG INTISARI PANCASILA

'Senjata' Bangsa Hadapi Covid-19

JAKARTA (KR) - Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan sebuah jargon yang pernah dicetuskan Presiden pertama Soekarno, usai mengikuti upacara perayaan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni, Senin (1/6). Jargon yang diingatkan Puan adalah *Ho lopis kuntul baris*, yang dicetuskan Bung Karno untuk membakar semangat rakyat agar bersatu membangun negeri ini.

"*Ho lopis kuntul baris* buat kepentingan bersama, itulah gotong royong," ujar Ketua DPR Puan Maharani, kemarin, seraya menyebutkan, Bung Karno, di dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 menjelaskan, intisari dari Pancasila adalah gotong royong, yakni suatu paham dinamis yang lebih dinamis dari kekeluargaan.

"Gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan," ujar Puan.

Ia mengatakan, kalimat yang Bung Karno ucapkan berbunyi, "Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat

semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. *Ho lopis kuntul baris* buat kepentingan bersama. Dari semua untuk semua".

Penjelasannya, kata Puan, bila ada kemauan untuk bersama, sesuatu yang berat sekalipun akan mampu diatasi. Kini, kapanpun membutuhkan kebersamaan. "Kita seharusnya senang dengan semakin banyaknya orang yang bergabung dalam kebersamaan," papar Puan.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai Indonesia telah menunjukkan kepada dunia, ideologi Pancasila yang bersarikan gotong royong telah mampu menjadi 'senjata' bangsa menghadapi pandemi Covid-19.

Hal itu menurutnya, terlihat melalui sigapnya masyarakat berada di garis terdepan perjuangan melawan virus Korona ini, mulai dari menggalang donasi, memberikan bantuan, hingga menyiapkan tempat karantina secara mandiri di lingkungan RT/RW setempat.

Ketua Umum PP Muhammadiyah

Prof Dr Haedar Nashir menyatakan, dalam Mukhtamar ke-47 (2015) di Makassar, Muhammadiyah menetapkan negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah*, karena Muhammadiyah berpendapat, NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah bentuk negara yang ideal dan karenanya harus dipertahankan.

Muhammadiyah sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat dan bangsa Indonesia berusaha mewujudkan Indonesia yang berkemajuan sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945.

Dalam tausiyah kebangsaan tentang Pancasila, yang ditandatangani bersama Sekum PP Muhammadiyah Dr Abdul Mu'ti itu, disebutkan, tausiyah kebangsaan itu, sebagai partisipasi masyarakat sipil dan tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan organisasi melalui para tokohnya berperan penting dalam perumusan dasar negara Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Ati/Fsy)-d

MUHAMMADIYAH LAKUKAN KAJIAN FIKIH

Salat Jumat Dimungkinkan 2 Gelombang

YOGYA (KR) - Muhammadiyah menyambut baik keluarnya Surat Edaran (SE) Menteri Agama No 15/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan di Rumah Ibadah. Meski demikian, Muhammadiyah tidak serta merta membuka masjid-masjid di bawah ormas keagamaan ini, sebelum melakukan evaluasi dan kajian.

"Hari Rabu kajian fikihnya, semoga sudah selesai. Dalam kajian ini kita melibatkan Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) mulai dari tingkat bawah untuk memberi masukan dan mengevaluasi. Jika di wilayah tersebut masih ada ODP, PDP bahkan positif Covid atau OTG, masjid di sekitar itu belum bisa dibuka," jelas Ketua PP Muhammadiyah dr Agus Taufiqurrahman SpS MKes dalam *media gathering* di Kantor PP Muhammadiyah di Jalan Cik Di Ditiro, Senin (1/6).

Selain Agus Taufiqurrahman, pa-

paran juga disampaikan Ketua MCC-CC PP Muhammadiyah Agus Syamsuddin MA. Dalam kajian yang dilakukan, ujar Agus Taufiqurrahman, salat Jumat termasuk hal yang dibahas. "Kita dalam membuka tempat ibadah tetap menerapkan protokol kesehatan khususnya *physical distancing*, maka masjid kita tidak akan cukup melakukan satu gelombang ibadah Jumat. Kajian fikih kita dengan Majelis Tarjih menyatakan, hal itu bisa dilakukan, sehingga mungkin nanti ada masjid yang melaksanakan salat dua gelombang. Misal gelombang pertama pukul 12.00 dan gelombang kedua pukul 13.00," jelas Agus.

Di Masjid Nabawi saja, katanya, dibuka kurang dari 40% kapasitasnya. Artinya, jika mengacu ke masjid tersebut dan semua masjid hanya dibuka untuk 40% kapasitas, pelaksanaan salat dua gelombang dalam kajian Muhammadiyah menjadi hal yang tak masalah. "Semua ini harus

dengan disiplin. Jangan sampai setelah dibuka, masjid menjadi klaster penularan baru," tambahnya.

Dalam kenormalan baru ini, lanjut Ketua PP Muhammadiyah ini, tidak sekadar mengenakan masker, hand sanitizer dan *social distancing* semata. Kalau melihat penambahan kasus baru masih di atas 600, maka langkah hati-hati menjadi bagian penting.

"Menggunakan analisa epidemiologi Unair, harus diakui kita kurang disiplin dalam melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Supermarket dan minimarket masih buka 91%, tempat ibadah 85% dan angkutan umum lebih 40% yang jalan," katanya.

Ketika pola tatakahidupan baru dilaksanakan, menurutnya, harus menjadi bagian mendidik agar seluruh elemen bangsa disiplin dengan protokol yang ada. Agus menyebutkan, banyak pelajaran dari negara lain yang bisa diambil. (Fsy)-a

GRATIFIKASI LEBARAN

KPK Terima 58 Laporan

JAKARTA (KR) - Laporan tentang gratifikasi terkait Lebaran 2020 yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga akhir Mei tercatat 58 laporan penerimaan gratifikasi dengan total Rp 62,8 juta. Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, pelaporan tersebut berasal dari 10 kementerian/lembaga yang mencapai 28 laporan.

"Selain itu ada tiga pemerintah provinsi dan sembilan pemerintah kabupaten/kota dengan jumlah 22 laporan serta lima BUMN/D dengan total delapan laporan," jelas Ipi Maryati Kuding melalui keterangannya di Jakarta, Senin (1/6).

Ia mengungkapkan, barang gratifikasi masih berkisar pada parsel makanan, barang pecah belah, voucher dan uang dengan nilai laporan terendah Rp 50 ribu hingga Rp 10 juta. Sedangkan, tujuan pemberian dimaksudkan sebagai tambahan uang dalam menyambut bulan Ramadan, Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri, hingga ucapan terima kasih karena telah menggunakan produk ter-

tentu. Disebutkan Ipi, medium pelaporan yang paling banyak digunakan adalah melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) individu sebanyak 36 laporan. Selain itu, GOL unit pengelola gratifikasi (UPG) berjumlah 14 laporan dan surat elektronik baik yang disampaikan individu maupun melalui UPG sebanyak delapan laporan.

KPK mengimbau pegawai negeri dan penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, khususnya terkait momen Ramadan dan Idul Fitri agar segera melaporkan kepada lembaga antirasuah ini.

Imbauan itu disampaikan, karena sesuai peraturan perundang-undangan penerimaan gratifikasi tersebut harus dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Pejabat yang melaporkan penerimaan gratifikasi, kata Ipi, terbebas dari ancaman pidana sebagaimana Pasal 12B UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

"Pasal itu ancamannya pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar," kata Ipi.

Mengacu pada Peraturan KPK No 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, Ipi menjelaskan, pelapor menyampaikan laporannya dengan mengisi formulir laporan yang paling sedikit memuat informasi tentang identitas penerima berupa nomor induk kependudukan (NIK), nama, alamat lengkap dan nomor telepon.

Informasi pemberi gratifikasi, jabatan penerima gratifikasi, tempat dan waktu penerimaan gratifikasi, uraian jenis gratifikasi yang diterima, nilai gratifikasi yang diterima, kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi dan bukti, dokumen atau data pendukung terkait dengan laporan gratifikasi.

Formulir isian laporan tersebut, dapat disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku. (Ful)-a

ALUMNI KAGAMA DIAJAK BERSINERGI

Negara Ditantang Terapkan 'New Normal'

YOGYA (KR) - Ketua Umum Keluarga Alumni Gajah Mada (Kagama) Ganjar Pranowo mengajak seluruh alumni untuk menjaga sinergi. Sebab, saat ini negara sedang ditantang untuk menerapkan 'New Normal' (Kenormalan Baru).

Sehingga perlu dibahas bagaimana melakukan pemulihan di berbagai sektor. Karena pada situasi seperti ini, akan baik jika energi kita terus didorong untuk melakukan hal-hal yang positif dan solutif, agar bermanfaat bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo dalam Syawalan Online Kagama yang diikuti sekitar 1.000 alumni se-Indonesia Raya, Minggu (31/5). Selain menyampaikan selamat Idul Fitri, Ganjar menyebutkan jika peserta syawalan termasuk alumni UGM yang tersebar di 15 negara. Mereka antara lain berasal dari Pengurus Kagama Cabang Luar Negeri seperti Kuwait, Arab Saudi, India, Inggris, Prancis, Jerman, Malaysia, Singapura, Timor Leste, dan lainnya.

Ganjar yang juga Gu-

bernur Jawa Tengah itu mengapresiasi langkah Kagama di masa pandemi yang sudah banyak menunjukkan kepedulian kepada masyarakat. Mulai dari pembagian APD hingga merumuskan solusi ketahanan pangan. "Kita terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya, dan partai politik. Saat ini, masyarakat sedang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan berbagai masalah di masa pandemi," kata Ganjar.

Untuk itu, ajaknya, mari kita hilangkan sekat-sekat tersebut. Kemudian bersatu untuk menemukan solusi sesuai dengan keahlian dan kemampuan kita masing-masing.

Syawalan Kagama diinisiasi Kagama dan Universitas Gajah Mada. Ketua panitia acara, Sulastama Rahardja mengatakan,

syawalan secara daring ini bisa menjadi ajang bagi alumni untuk berlatih menghadapi new normal. Di masa pandemi ini, Kagama menurut Sulastama juga berusaha memberikan terobosan dan kreativitas dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

"Salah satunya mengadopsi gerakan *canthelan* dalam kegiatan pembagian sembako ke masyarakat," tandasnya. Selain itu, katanya, juga konser virtual yang digelar oleh komunitas Adiswara dan Kagama Beksan, yang berhasil mengumpulkan donasi sekitar Rp 100 juta," ujar alumni Teknik Geologi UGM itu. Donasi tersebut, jelasnya, akan dimanfaatkan kagama untuk merealisasikan program ketahanan pangan.

Rektor UGM Prof Panut Mulyono menyampaikan rasa bangganya kepada para alumni dari penjuru dunia. "Jelang Hari Lahir Pancasila, pandemi Covid-19 telah menyadarkan kita bahwa, situasi ini turut mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila," katanya. (Fsy)-d

PANDEMI COVID-19 DI 15 PROVINSI

Tak Ada Tambahan Kasus Positif

JAKARTA (KR) - Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per Senin (1/6) sebanyak 467 kasus, sehingga totalnya menjadi 26.940 kasus positif. Kemudian untuk pasien sembuh menjadi 7.637 setelah ada penambahan 329 orang. Sedangkan untuk kasus meninggal bertambah 28 orang sehingga totalnya menjadi 1.641 orang.

"Terkonfirmasi 467 positif Covid-19, sehingga angkanya menjadi 26.940 orang, kenaikan ini tentunya merupakan gambaran keseluruhan dari negara kita," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yuriyanto di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (1/6).

Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan

333.415 spesimen menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 95 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 59 laboratorium dan laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 179 lab. Secara keseluruhan, 232.113 orang telah diperiksa dan hasilnya 26.940 positif (kumulatif) dan 205.173 negatif (kumulatif).

Kemudian untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau 48.358 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi 13.120 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 416 kabupaten/kota di Tanah Air.

Sementara data provinsi lima besar dengan kasus positif terbanyak secara kumulatif DKI Jakarta 7.485 orang, Jawa Timur 4.922, Jawa Barat 2.294, Sulawesi Selatan 1.586, Jawa Tengah 1.417 dan wilayah lain sehingga totalnya 26.940.

(Ati)-a

djp

Penghentian Pelayanan Perpajakan Melalui Tatap Muka

DIPER PAN JANG

SAMPAI 14 JUNI

Kunjungi link di bawah ini yang berisi daftar nomor/email untuk pelayanan maupun konsultasi:

- KPP Pratama Yogyakarta**
linktr.ee/pajakogyakarta
- KPP Pratama Sleman**
linktr.ee/pajaksleman
- KPP Pratama Bantul**
linktr.ee/kpppratamabantul
- KPP Pratama Wates**
linktr.ee/pajakwates
- KPP Pratama Wonosari**
linktr.ee/pajakwonosari

BERSIAPAN MENUJU NORMAL BARU